



BPK Sudah Audit Dana Bansos KONI

PONTIANAK-RK. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar mengaku, audit dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar tahun 2007, 2008 dan 2009 sudah selesai dan telah diserahkan ke Polda Kalbar.

"Untuk yang KONI kita sudah serahkan bulan Maret 2012 lalu ke Polda Kalbar. Namun Bansos yang ke

**Tak Ada Alasan Polda
Tak Memproses
Dugaan Korupsi
Bansos KONI**

Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan itu posisi terakhir, permintaan pihak Polda September 2013 kemarin. Kami sudah

jawab suratnya, bahwa kami masih menunggu dokumen dan bukti baru yang didapatkan oleh pihak penyidik," N Diva Mahaendra, Koordinator Wilayah Kalbar I A di Hotel Mercure, Selasa (10/12).

Namun Diva enggan menyampaikan, jumlah dan potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana Bansos KONI tersebut. Menurutnya itu merupakan kewenangan penyidik Polda Kalbar. "Terkait hasil laporan penghitungan kerugian negara tidak

■ Halaman 6



BPK Sudahdari halaman 1

kami publik, karena itu masalah kewenangan, itu hanya untuk kepentingan pemohon (penyidik Polda Kalbar) untuk salah satu alat bukti dalam persidangan," katanya.

Divya melanjutkan, BPK sebelumnya telah mempunyai dugaan awal, bahwa audit KONI ada indikasi kerugian negara. Namun terkait masalah pembuktian siapa yang harus bertanggungjawab, menurut dia, itu kewenangannya penyidik.

"Tapi dari proses pemeriksaan kami, baik secara administrasi maupun keuangan, kita telah temukan bahwa ada penggunaan dana Bansos KONI yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Setelah ditemukan indikasi kerugian negara, BPK menyerahkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses. Namun Divya Mahaendra mengatakan, tidak mengetahui persis mengapa kasus tersebut kembali dilimpahkan ke Polda Kalbar.

"Awalnya pada 2009, kita su-

dah limpahkan ke KPK, setelah itu bukan kewenangan kami untuk mengutak-atik, tugas kami selesai disitu. Karena dalam penghitungan keuangan negara, apabila ada indikasi kerugian, maka kami menyampaikannya ke penegak hukum yakni KPK. Untuk tepatnya konfirmasi ke KPK atau Polda Kalbar terkait pertimbangan KPK menyerahkan kasus tersebut ke Polda untuk dilakukan penyidikan," pinta Divya.

Divya juga enggan menyebutkan nama-nama pejabat publik di Kalbar, seperti yang berkembang selama ini yang terlibat melakukan penyimpangan dana Bantuan Sosial untuk KONI Kalbar tersebut.

"Sekrang kalau kita bicara tokoh-tokoh penting yang terlibat disitu, itu sudah bisa terjawab. Dari hasil pemeriksaannya, cuma permasalahannya adalah apakah mereka terlibat langsung atau tidak, itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan penyidik, fakta persidangan yang akan me-

mentukan," tegasnya.

Hanya saja, menurut Divya dalam perhitungan kerugian itu, BPK tidak langsung men-skip, siapa yang harus bertanggungjawab penuh atas dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos itu. "Tapi kami sudah menguraikan siapa-siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan itu, siapa yang menyetujui anggaran, otomatis dia yang bertanggungjawab," jelas Divya.

Terkait indikasi tindak pidana korupsi dana Bansos Kalbar ke pada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan tahun 2006, 2007 dan 2008, Divya mengaku sedang menunggu dokumen tambahan dari pihak pemohon, dalam hal ini penyidik Polda Kalbar.

"Yang sedang kami kerjakan sekarang dan bekerjasama dengan Polda Kalbar, terkait permintaan Polda untuk penghitungan kerugian negara atas kasus dana Bansos Kalbar ke Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan tahun 2006,

2007 dan 2008," papar Divya.

Hanya saja kata dia, beberapa dokumen yang diajukan pihak pemohon belum cukup untuk dilakukan audit atas kerugian negara. Menurutnya, saat melakukan proses penghitungan kerugian negara, semua dokumen dan data dari pemohon harus lengkap, makanya BPK mengirimkan surat balasan kepada Reskrim-sus Polda Kalbar.

"Penyidik meminta kembali kepada BPK untuk menyampaikan kerugian, kita sudah jawab. Dalam surat itu kami menyampaikan, bahwa kami belum dapat melanjutkan proses penghitungan kerugian, ini surat terakhir kami ke Polda. Kami belum mempunyai keyakinan yang memadai atas kasus yang diminta pemohon (Bansos Untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan), maka kami meminta bukti tambahan," ungkap Divya.

Laporan : Andreas
Editor: Hamka Saptono